

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran bisnis dan ekonomi yang terjadi secara masif sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 memicu perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Seperti diketahui, pandemi menuntut semua perusahaan baik secara global untuk mempercepat pada adopsi di sisi teknologi. Hal itu mempengaruhi proses bisnis dan mengharuskan dunia usaha untuk terus berinovasi serta mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Perusahaan dituntut untuk bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja keuangannya ditengah pandemi dari persaingan yang semakin ketat. Penerapan tata kelola merupakan kewajiban dalam upaya mewujudkan konsep *good corporate governance* (GCG) agar bisa memberikan kinerja yang memuaskan.

Good corporate governance (GCG) tetap menjadi pondasi dari setiap perubahan yang terjadi karena perusahaan yang memiliki akar kuat dalam hal GCG, besar kemungkinan perusahaan masih dapat bertahan dan menghasilkan berbagai produk yang berkualitas (Boediono, 2021).

Dampak tidak menerapkan GCG bukan hanya dirasakan bagi perusahaan pada tingkat terparah tutupnya perusahaan tersebut tapi juga perekonomian suatu negara. Banyak perusahaan di Indonesia, baik swasta maupun BUMN yang belum menerapkan GCG secara berkesinambungan sehingga berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan. Perusahaan sektor

Bank BUMN, Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk yaitu badan usaha perseroan (Persero) dan badan usaha umum (Perum). Perusahaan perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan perusahaan perseroan adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Selanjutnya, perusahaan umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud

dan tujuan perusahaan umum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Dari kedua jenis BUMN tersebut, hanya perusahaan perseroan (Persero) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.sahamok.com).

Saham emiten BUMN memiliki risiko yang lebih rendah dibanding saham emiten swasta, hal ini disebabkan adanya upaya pemerintah untuk mengawasi kinerja BUMN. BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka perusahaan akan memperoleh sumber pendanaan baru tanpa harus mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan juga perusahaan menjadi lebih transparan. (www.investasi.kontan.co.id), hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* pada perusahaan sektor Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI, karena perusahaan yang terdaftar di BEI datanya terpublikasi) periode 2013-2020.

Perbankan berada dalam kondisi baik pada saat pandemi. Kondisi tersebut tercermin pada permodalan, kualitas kredit, dan likuiditas yang tetap baik. Kredit berkontraksi 2,41% sejalan dengan permintaan domestik yang lemah dan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit. Perekonomian yang membaik pada semester II 2020 berdampak positif pada persepsi penanaman modal, sehingga aliran masuk modal asing kembali terjadi dan mendorong penguatan nilai tukar Rupiah, memperkuat stabilitas

perekonomian, dan mempercepat proses pemulihan ekonomi. (laporan Perekonomian Indonesia, 2020)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan membutuhkan likuiditas Rp 144 triliun untuk penundaan pokok selama 6 bulan. Hal ini dikarenakan, walau nasabah menunda pembayaran pokok, namun bank tidak boleh menunda pembayaran deposito yang telah jatuh tempo kepada deposan. Dikutip dari cnbcindonesia.com NPL (non-performing Loan) perbankan per Juni 2020 tercatat 3,11% dari 2,53% per Desember 2019. Sedangkan NPF (non-performing financing) mencapai 5,12% per Juni 2020 dari 4,41% per Mei 2020. (laporan Perekonomian Indonesia, 2020)

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang sering dikenal dengan *good corporate governace* (GCG) adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa hak pemegang saham sangat penting dalam mendapatkan sebuah informasi yang akurat, tepat waktu dan benar. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan dengan akurat, tepat waktu, dan transparan. *Good corporate governance* juga diperlukan untuk memudahkan akses terhadap investasi yang masuk, memberikan keputusan yang baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan serta meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan apabila akan melakukan penanaman modal. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good*

corporate governance (GCG) tidak hanya dijadikan sebagai aksesoris belaka, tetapi mengupayakan untuk meningkatkan kinerja keuangan (Darmawati, 2014).

Penerapan *Corporate Governance* sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan publik yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* (IDX). Seiring dengan berkembangnya konsep *Corporate Governance*, maka *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) sebagai lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia, melakukan riset dan pemeringkatan terhadap penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan publik, atau dikenal dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Riset dan pemeringkatan CGPI ini bertujuan untuk memotivasi pelaku dunia bisnis dalam melakukan konsep *corporate governance* dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan praktik *Good Corporate Governance* (IICG, 2009). Penerapan *corporate governance* sendiri diharapkan dapat memaksimalkan nilai perseroan, baik bagi perseroan tersebut maupun bagi pemegang saham. Akan tetapi saat ini perlindungan hak-hak pemegang saham perusahaan-perusahaan di Indonesia tercatat masih rendah. (Susanti dan Wijaya, 2016).

Teori *stakeholder* memberi penjelasan bahwa sesungguhnya perusahaan bukan hanya beroperasi dengan mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga dapat bermanfaat untuk *stakeholdernya* (pemegang saham)

kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah dan masyarakat. Dengan hal ini, adanya perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh dukungan-dukungan yang didapat dari para *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Karena hal tersebut, perusahaan perlu melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Menurut Sutedi (2012) mekanisme *good corporate governance* diantaranya mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal.

Mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini hanya berfokus pada unsur-unsur dalam mekanisme *good corporate governance* dengan ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran kepemilikan manajerial. Karena dewan komisaris independen sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme internal dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang turut bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan keuangan. Proporsi komite audit dapat memonitor kinerja manajemen sehingga dapat

meminimalisasi perilaku menejer dalam melakukan manajemen laba sehingga dapat meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. (Surjadi dan Tobing, 2016). Kepemilikan manajerial juga sebagai pendorong dalam meningkatnya kinerja perusahaan, dengan demikian kepemilikan manajerial selaku pemegang saham dapat lebih berhati-hati dalam tindakan kecurangan manipulasi data.

Kinerja keuangan adalah patokan utama yang digunakan dalam menilai baik dan tidaknya kinerja pada suatu perusahaan (Sarafina, 2017). Kinerja perusahaan adalah tolak ukur akan keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Tujuan dari menganalisis tentang laporan keuangan perusahaan, yaitu agar dapat mengevaluasi dan menilai suatu kinerja yang pada khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta untuk menentukan strategi apa yang diterapkan pada periode berikutnya jika dalam tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai. Riandi (2011), menyebutkan bahwa penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan cara meningkatkan kinerja keuangan, menurunkan risiko dan meningkatkan kepercayaan investor. Indikator yang biasanya digunakan dalam menilai kinerja keuangan pada suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan.

Kinerja keuangan perusahaan sangat erat sekali hubungannya dengan peran dan fungsi dari manajemen. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu indikator untuk menilai efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan utamanya. Penilaian

terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2014), dari laporan keuangan dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan, aliran kas, dan informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan untuk dapat menghasilkan keuntungan merupakan suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan. Laporan laba rugi merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk satu periode tertentu. Angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi sering dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tidak mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Arus kas (Cash Flow) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima perusahaan dan dibebani oleh beban yang bersifat tunai serta benar-benar yang sudah dikeluarkan perusahaan.

Penerapan GCG sangat penting bagi dunia perbankan karena lembaga perbankan memiliki fungsi yang sangat penting

bagi perekonomian di Indonesia. Pertama, bank berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Perbankan dalam perekonomian modern merupakan industri jasa yang dominan dan menunjang hampir seluruh program pembangunan ekonomi, karena kegiatan perekonomian itu dijalankan dengan uang (Darmawi, 2012). Kedua, bank sebagai agent of trust yaitu lembaga yang menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan jasa yang baik kepada masyarakat. Ketiga, bank juga berfungsi untuk menjaga kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Menurut World Bank Reports (2012), krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN dan menyebabkan penurunan kinerja keuangan perusahaan terjadi karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Kegagalan penerapan GCG ini berasal dari sistem kerangka hukum yang masih lemah, kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan auditor, dan juga praktik perbankan yang buruk sehingga bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Good Corporate Governance merupakan salah satu komponen non keuangan yang sekarang menjadi isu penting dan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan laba dan kinerja keuangan perusahaan. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*). GCG dapat diartikan juga sebagai suatu

pengendalian internal perusahaan guna mengelola resiko yang signifikan dengan mendorong terbentuknya manajemen perusahaan yang bersih dan transparan. Tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi

Stakeholder dari perilaku manajemen yang tidak bersih dan tidak transparan. Penerapan GCG juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perbankan. Penerapan GCG dinilai dapat memperbaiki citra perbankan dan akan menciptakan iklim usaha yang ehat serta mendorong peningkatan kinerja perbankan (Peraturan Bank Indonesia, 2013)

Selanjutnya, ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar/kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar. Menurut Zeptian dan Rohman (2013) perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Perusahaan yang lebih besar dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentingan investasi, karena perusahaan besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga

dalam melakukan pelaporan lebih hati-hati. Perusahaan-perusahaan yang berukuran besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar juga. Kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh perusahaan besar akan membawa pengaruh yang besar juga terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar akan membuat manajer lebih hati-hati di dalam membuat laporan keuangan yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

Ukuran perusahaan (firm size) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Apabila terjadi peningkatan aset yang dimiliki bank maka tidak tertutup kemungkinan bank meningkatkan penempatan dananya di sektor kredit. Ketika aset yang dimiliki tidak digunakan dengan maksimal, maka risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank untuk mengelola aset yang ada akan semakin meningkat. Penjumlahan dari aset lancar dan aset tetap merupakan total aset yang dimiliki oleh pihak bank. Untuk menilai seberapa besar harta perusahaan atau untuk mendapatkan rasio ukuran perusahaan, dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu. Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan pertimbangan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti akan menggunakan judul **“Pengaruh Good Corporate Governace dan ukuran Perusahaan**

Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah *Good Corporate Governace* (GCG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Good Corporate Governace* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh akademisi dalam ilmu akuntansi dan pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengaruh *Good Corporate Governace* (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan yaitu salah

satunya teori *stakeholder*. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan.

2. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana dibidang keuangan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan pada masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya *Good Corporate Governace* (GCG) yang diungkap sehingga membantu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang berdampak pada volume perdagangan perusahaan, sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan pengelola perusahaan lebih baik.

2. Bagi Investor, memberikan wawasan baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi, memberikan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sebagai investasi dan diharapkan membantu investor untuk berinvestasi secara bijak.